Volksgeist
ISSN Print 2615-5648
ISSN Online 2615-174X
Kantor Editor : Lantai 2 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto Jawa Tegah 53126 Indonesia
Telp. : +62 281 635624 Fax. +62 281 636653
E-Mail : volksgeist@iainpurwokerto.ac.id
Website : http://ejournal.iainpurokerto.ac.id/index.php/volksgeist

Strategi Kebijakan Menyongsong Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Perspektif Hukum Ekonomi

Asianto Nugroho, Sapto Hermawan[1]

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
[1]Email: *saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id*

Abstrak

Artikel ini bertujuan mencermati kebijakan yang dapat ditempuh oleh Pemerintah, termasuk strategi penanganan pandemik sekaligus kebijakan membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi nasional melalui strategi kebijakan yang mempertimbangkan aspek peluang dan ancaman. Artikel ini adalah hasil penelitian hukum dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi Covid-19 dapat ditempuh melalui beberapa kebijakan berbasis perspektif hukum ekonomi. Beberapa strategi dapat diambil melalui penguatan kerjasama perdagangan dengan Pemerintah Tiongkok, membangkitkan jasa pariwisata, memperkokoh perekonomian perdesaan, restrukturisasi UMKM dengan jaminan berlapis, optimalisasi peran tanggung jawab BUMN dalam pembangunan nasional, serta penguatan peran politik hukum yang diterapkan di Indonesia.

Kata Kunci: *Kebijakan pemerintah, pandemi Covid-19, resesi ekonomi.*

Abstract

This article aims to examine the govermenent policies, including pandemi handling strategies as well as policies to revive national economic growth through a policy strategy that considers opportunities and threats aspects. This paper presents the result of legal researchusing secondary legal material. This article argues that the policy of restoring national economic growth caused by the COVID-19 pandemic can be pursued through several policies based on economic and legal perspective. Several strategies can be taken such as strengthening trade cooperation with the Chinese Government, generating tourism services, strengthening the rural economy, restructuring MSMEs with multiple layers of guarantees, optimizing the role of SOE responsibilities in national development, and strengthening the role of legal political in Indonesia.

Keywords: *Government policy strategy, pandemi Covid-19, economic recession*

Sejarah Artikel
Dikirim: 23 Juli 2020
Direview: 03 November 2020
Diterima: 25 Desember 2020
Diterbitkan: 27 Desember 2020

PENDAHULUAN

Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi minus dan terkontraksi pertumbuhan ekonominya, karena terdampak akan ketidakpastian kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Hal ini disebabkan belum diketemukan obat yang ampuh untuk

Vol. 3 No. 2 Desember 2020
DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001

membasmi penyakit ini dan belum diformulasikan strategi paling mujarab tentang bagaimana upaya yang sistemik untuk mempercepat pemulihan sektor perekonomian. Fenomena resesi ekonomi ini terjadi hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia mengalaminya. Indonesia terancam resesi ekonomi dan diprediksi minus pada kuartal II secara berturut turut pada tahun 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi hingga minus 3,8 persen pada kuartal II[1] 2020 dan estimasi Badan Kebijakan Fiskal terjadi minus 3.8 persen.[2] Dampak resesi ekonomi Indonesia akibat pandemik COVID-19 terjadi banyaknya pengangguran, angka kemiskinan akan naik dan munculnya masalah sosial baru .

Minusnya pertumbuhan ekonomi dan terjadinya resesi ekonomi Indonesia,[3] karena pemerintah Indonesia mengambil kebijakan penanganan bersyarat, di aman menghimbau masyarakat untuk tinggal di rumah dalam batas waktu yang tidak ditentukan selama pandemi COVID-19. Akibatnya, banyak warga atau masyarakat tidak dapat bekerja semestinya, bahkan tidak bekerja sama sekali atau pengangguran akibat terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)[4], publik tidak membuka usahanya karena dilarang beraktivitas dan bepergian demi alasan kesehatan. Krisis akibat pandemi COVID-19 ini berbeda karena pemerintah Indonesia dengan sengaja menghentikan aktivitas masyarakatnya. Kontraksi menurunnya pertumbuhan ekonomi salah satunya dipicu pada saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi mempersempit laju penyebaran virus COVID-19, sehingga otomatis kegiatan ekonomi melambat dratis dan lumpuh.

Krisis sebelumnya terjadi depresi besar *(great depression*), depresi hebat ini berlangsung hingga awal Perang Dunia II dan Indonesia telah mengalami krisis ekonomi semasa awal orde lama, akhir orde baru, dan awal era reformasi krisis tahun 1997-1998 hanya beberapa sektor yang berdampak, namun krisis sebagai dampak pandemi COVID-19 berpengaruh signifikan hampir pada seluruh sektor.

[1] Cantika Adinda, "DPR Rapat Dengan Sri Mulyani, BI, OJK Bahas Nasib RI 2021," accessed December 19, 2020, https://www.cnbcindonesia.com/news/20200622102431-4-167018/dpr-rapat-dengan-sri-mulyani-bi-ojk-bahas-nasib-ri-2021.

[2]Badan Kebijakan Fiskal, *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021* (Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal, 2020), 2.

[3]Enny Sri Hartati, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan bahwa ekonomi sebuah negara bisa dikatakan mengalami resesi jika terjadi penurunan ekonomi secara eksesif. Lebih lanjut bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia.Indonesia mencatatkan inflasi yang sangat rendah pada bulan Mei 2020, hanya 0,07 persen, salah satu indikasi bahwa daya beli masyarakat sedang sangat jatuh.Inflasi merupakan kenaikan harga barang-barang dan jasa yang salah satunya disebabkan oleh melonjaknya permintaan. Oleh karenanya, daya beli masyarakat yang lemah bisa menurunkan tingkat inflasi lihat ryz, "Lebih Berat Dari Krisis 1998, Ini Tanda-Tanda Ekonomi Indonesia Alami Resesi : Okezone Economy," accessed December 19, 2020, https://economy.okezone.com/read/2020/06/24/20/2235630/lebih-berat-dari-krisis-1998-ini-tanda-tanda-ekonomi-indonesia-alami-resesi.

[4]Suryani Motik Wakil Ketua umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bidang UMKM menyebutkan bahwa warga yang menjadi korban PHK akibat pandemi bisa mencapai 15 juta jiwa, bahkan Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 lalu merilis sebanyak 2,8 juta warga menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan akibat pandemi COVID-19. Lihat Indrianto Eko Suwarso, "Bukan 2 Juta, Kadin Sebut Korban PHK Akibat Corona 15 Juta," accessed December 19, 2020, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200501181726-92-499298/bukan-2-juta-kadin-sebut-korban-phk-akibat-corona-15-juta.

Vol. 3 No. 2 Desember 2020
DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001

Pada awal bulan Juni 2020 kegiatan perekonomian secara bertahap mulai dibuka, harapannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kuartal berikutnya. Pertimbangan ini dilakukan karena banyak pekerja di sektor non formal tidak mampu bertahan. Kendati sejumlah fasilitas publik, bisnis dan pariwisata mulai di buka kembali dengan labelisasi '*new normal'*, namun demikian diprediksi belum mampu untuk mendorong perekonomian secara signifikan. Ekonomi pariwisata yang diharapkan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi domestik dengan kontribusi di atas 50% terhadap total *product domestic brutto* (PDB), pada kenyataannya akan berbenturan dengan protokol kebijakan kesehatan yang rigid.

Sejumlah lembaga internasional memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 begitu suram. Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran angka -0,3%,[5] Organisasi kerjasama dan Pembangunan ekonomi (OECD) prediksinya di kisaran -3.9% hingga -2.8%, dan Bank Pembangunan Asia (ADB) berkisar -1%. Pemerintah Indonesia mempunyai perhitungan proyeksi partumbuhan ekonomi terkontraksi sebesar -0.4 hingga 1%. Pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia merasa pesimistis dengan prospek pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun 2020.[6]

Pemerintah menghadapi resiko terburuk terjadinya resesi pertumbuhan ekonomi adalah di luar sektor kesehatan dan sosial[7] antara lain realisasi penurunan

[5]Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia menurun pada 2020 akibat krisis pandemi Covid-19. Negara-negara berkembang diramal mengalami kontraksi, seperti Filipina (6% -3,6 persen), Malaysia (4,3% -3,8%), India (4,2%-4,5 persen), dan Thailand (2,4% -7,7 persen). Singapura 0,7 -3,5% Indonesia diprediksi memiliki pertumbuhan ekonomi 5% -0,3 %. Negara-negara maju di Asia diperkirakan mengalami hal serupa. Ekonomi Jepang akan turun tajam dari 0,7 persen menjadi -5,8 persen, lalu Korea Selatan akan mencatat kemerosotan dari 2 persen menjadi -2,1 persen. Pada April 2020, IMF juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Singapura sepanjang tahun ini -3,5 persen. Meski begitu, masih ada negara yang diprediksi memiliki pertumbuhan ekonomi positif. Tiongkok akan tumbuh satu persen, sementara Vietnam akan tumbuh 2,7 persen berdasarkan proyeksi April 2020 lihat Andrea Lidwina, "Proyeksi Suram Ekonomi Indonesia - Infografik Katadata.Co.Id," accessed December 19, 2020, https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5ef3fb527c9e2/proyeksi-suram-ekonomi-indonesia.

[6]Sri Mulyani 2020. Saat rapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), senin 22 Juni….mengatakan Indonesia cukup terhantam keras dengan penyebaran virus Corona.Tidak hanya kesehatan manusia, virus ini juga mengganggu kesehatan ekonomi di seluruh dunia. Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario terburuk bisa minus 0,4 persen."Pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan *assessment* yang tadi kita lihat, BI, OJK, LPS, dan kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3 persen, bahkan dalam skenarionya yang lebih buruk, bisa mencapai negatif 0,4 %," ungkapnya dalam telekonferensi di Jakarta, Rabu 1 April. Lihat Hendra Kusuma, "Sri Mulyani-DPR Rapat Virtual Bahas Dampak Corona Ke Ekonomi RI," accessed December 19, 2020, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4966883/sri-mulyani-dpr-rapat-virtual-bahas-dampak-corona-ke-ekonomi-ri..

[7]Jokowi menginstruksikan tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun. Secara rinci, sebanyak Rp 75 triliun tambahan dana APBN untuk bidang kesehatan. Sebanyak Rp 100 triliun akan digunakan untuk program jaring pengaman sosial. Kemudian, Rp 70,1 triliun akan diberikan untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR). Rp 150 triliun dialokasikan pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. "Termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya UMKM," lihat Dimas Jarot Bayu, "Jokowi Buat Perppu Penyelamatan Ekonomi Dari Corona, Anggaran Rp 405 T - Nasional Katadata.Co.Id," accessed December 19, 2020, https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5e9a41f7ae83

Vol. 3 No. 2 Desember 2020
DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001

investasi tercapai 9% senilai Rp.172 trilliun dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp.785,8 trilliun. Fenomena ini terlihat dari penundaan sebanyak 189 proyek, karena *refocusing* peralihan prioritas anggaran khusus untuk penanganan pandemi COVID-19 di berbagai bidang dari 652 proyek yang sudah sampai pada *tahap Letter of Intent* (*LoI*). Sebesar 75% di berbagai bidang proyek yang mangkrak dan belum ada solusi secara komprehensif dalam pemulihan ekonomi nasional.

Persoalan rumit yang terjadi di saat pandemi adalah peran aspek hukum dan aspek ekonomi tidak bisa seiring bersamaan fungsi pelaksanaannya. Hal ini disebabkan (1) pilihan ekonomi mengarahkan manusia cenderung menghitung biaya transaksional, sementara (2) jika pilihan mengikuti hukum, keterbatasan dalam mencapai tujuan seringkali menjadi masalah. Di sinilah hukum dan ekonomi mungkin tidak bertemu, di mana kinerja pasar *(market performance*) menggambarkan efisiensi suatu pasar dalam menggunakan sumber daya untuk memenuhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Efisiensi yang dimaksud adalah seberapa baik suatu pasar dapat memberikan kontribusi pada optimalisasi kesejahteraan ekonomi *(economic welfare*). Tidak dapat diandalkannya penciptaan pasar sempurna, maka dalam hukum ekonomi diperlukan sebuah tangan tak terlihat (*the invisible hand*) adalah metafora oleh Adam Smith untuk menyebut manfaat sosial yang tak terduga berkat tindakan individu.[8]

Mendasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka artikel ini mau menguraikan strategi kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam menyongsong adaptasi kebiasaan baru sebagai dampak pandemik COVID-19 dari perspektif hukum ekonomi.

Artikel ini mengunakan pendekatan perundang-undangan sebagai dasar legalitas sebuah kebijakan dan pendekatan konseptual. Sumber informasi penelitian menggunakan bahan hukum sekunder. Teknik memperoleh sumber informasi bahan hukum menggunakan analisis substansi yang berasal dari artikel ilmiah, buku relevan, hasil penelitian sejenis yang relevan, dan kertas kerja terkait pokok permasalahan yang sedang dirumuskan. Analisis bahan hukum dikualifikasi, dikuantisir, kemudian dihubungkan antara kebijakan pemerintah sebagai premis mayor, dengan strategi penanganan COVID-19 dari perspektif hukum ekonomi sebagai premis minor. Penarikan hasil kesimpulan menggunakan logika hukum deduksi dan metode penalaran hukum.

PEMBAHASAN

Kerjasama Perdagangan dengan Pemerintah Tiongkok.

Keputusan Tiongkok secara tiba-tiba mengguncang pandangan (*outlook*) belahan seluruh dunia. Pemerintah Tiongkok mengejutkan dunia berupa kebijakan memutuskan untuk membatalkan patokan dolar dalam transaksi bursa dan memutuskan untuk secara resmi dan hubungan resmi dengan yuan Tiongkok berupa mata uang[9] digital dengan sebutan e-RMB, bukan dolar, hal ini adalah langkah berani dan mempengaruhi

b/jokowi-buat-perppu-penyelamatan-ekonomi-dari-corona-anggaran-rp-405-t..

[8]Adam Smith, *The Theory of Moral Sentiments* (London: Pinguin, 2008), 48.

[9] Menurut Hamdy pengertian valas adalah mata uang asing yang difungsikan sebagai alat pembayaran untuk membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan juga mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral; lihat Hamdy Hady, *Manajemen Keuangan Internasional*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2017). 10

Vol. 3 No. 2 Desember 2020
DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001

dunia bisnis dalam sejarah ekonomi Tiongkok. Peristiwa Ini berarti bahwa dolar telah menjadi tidak ada dalam perdagangan Tiongkok dan dolar AS akan jatuh atau kuat terhadap persaingan dunia bisnis terhadap yuan Tiongkok, sehingga diprediksi dapat memengaruhinya di pasar global.

Fenomena ini membuat semua pasar global terpana dengan keputusan itu. Ini adalah perang ekonomi dapat membawa dunia pada perang yang menghancurkan dan ancaman tidak boleh diabaikan jika Amerika bertindak bodoh dalam menghadapi keputusan ini. Tiongkok 2021 akan memimpin dunia. prediksi Ini adalah mimpi lama Tiongkok dan direncanakan untuk dicapai selama beberapa dekade atau lebih.

Seiring dengan meningkatnya perdagangan internasional, meningkat pula penggunaan valuta asing. Nilai tukar valuta asing selalu berubah-ubah (fluktuasi). Banyak hal yang mempengaruhi perubahan tersebut, misalnya tingkat inflasi, tingkat pendapatan masyarakat, suku bunga, kontrol pemerintah atas perekonomian, termasuk harapan atau perkiraan masyarakat mengenai kondisi-kondisi perekonomian di masa yang akan datang juga turut mempengaruhi perubahan dalam nilai tukar mata uang.[10]

Pemerintah Tiongkok merencanakan mata uang digital terpisah e-RMB, untuk bertarung dengan $.[11] Keberadaan e-RMB, akan menjadi mata uang digital pertama yang dioperasikan oleh ekonomi utama.Mata uang digital berdaulat menyediakan alternatif fungsional untuk sistem penyelesaian dolar dan menumpulkan dampak sanksi atau ancaman pengecualian baik di tingkat negara maupun perusahaan.

Penggunaan e-RMB ini Keuntungan bagi negara Indonesia jika Yuan benar benar menjadi Mata Uang Utama Dunia.HSBC memperkirakan dalam 5 tahun ke depan mata uang Tiongkok, Yuan atau reminbi, akan mendominasi perdagangan dunia. Saat itu, permintaan terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) akan berkurang. Bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, ketergantungan terhadap dolar AS yang berkurang akan memiliki dampak positif.

Tiongkok merupakan mitra dagang utama Indonesia,[12] bahkan yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Namun, perdagangan antar dua negara masih melibatkan dolar AS.Indonesia jika ingin mengimpor barang dari Tiongkok harus menggunakan dolar AS.Begitu pembayaran sampai di Tiongkok, pembayaran dalam dolar AS tersebut baru dikonversi menjadi

[10]Jeff Madura, *International Financial Management. 11th Edition*, (New York, NY: Prentice Hall. International, Inc, 2016).

[11]Perbedaaan antara RMB (Renminbi) dan CNY (Chinese Yuan), artikel berikut menjelaskannya. Renminbi (Hanzi :人民币) yang bahasa Indonesia berarti "mata uang rakyat" merupakan mata uang resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Renminbi merupakan penyebutan formal untuk mata uang yang berlaku di seluruh wilayah Tiongkok daratan. Mata uang Renminbi mulai diperkenalkan pada tahun 1949, dengan simbol internasionalnya adalah CNY (¥), atau CNH saat diperdagangkan di luar mainland China, seperti HongKong, Makau, Singapora, dsb. Sedangkan Yuan merupakan actual unit dari RMB.Yuan adalah nama unit atau satuan mata uang Renminbi. Secara umum, kita bisa mengatakan "Barang ini harganya 100 yuan", tapi akan keliru jika kita mengatakannya dengan "Barang ini harganya 100 renminbi". Dengan kata lain, "yuan" berlaku sebagai penyebutan nilai barangnya, sedangkan "renminbi" adalah nama mata uangnya. Lihat Lillian Yang, "China Starts Major Trial of State-Run Digital Currency | China | The Guardian," accessed December 19, 2020, https://www.theguardian.com/world/2020/apr/28/china-starts-major-trial-of-state-run-digital-currency.

[12] Data Penelitian 2020 hingga Bulan Juni diketahui bahwa nilai ekspor Indonesia berupa hasil palawija berupa jagung, kacang tanah, gaplek, kelapa sawit dan buah buahan jenis manggis, jeruk nipis, semangka, salak pondoh di masa pandemic tetap berjalan.

Vol. 3 No. 2 Desember 2020
DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001

yuan. Hal serupa juga terjadi ketika pihak Tiongkok ingin membeli produk Indonesia.Proses ini tentunya tidak efisien.

Oleh karena itu, Indonesia diuntungkan ketika Yuan menjadi mata uang utama dunia.Hubungan dengan Tiongkok, yang merupakan mitra dagang utama, menjadi lebih mudah dan efisien."Essensi selanjutnya akan terjadi peralihan permintaan dari mata uang asing yang sebelumnya di dominasi oleh dolar AS menjadi Yuan.

Strategi Baru Membangkitkan Sektor Pariwisata

Sejumlah daerah di Indonesia mulai membuka destinasi wisata[13] yang sementara ini ditutup karena pandemik COVID-19 sesuai anjuran Pemerintah, khusus wisata alam pembukaannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat resiko penularan COVID-19. Menerapkan adaptasi kebiasaan baru diperbolehkan tetapi tidak dipaksakan, apabila kondisinya belum kondusif, misalnya masih kategori zona hitam dan merah karena resiko penularan COVID-19 masih tinggi. Strategi baru dalam pembukaan destinasi wisata di tengah pandemik COVID-19 tidak semata mengandalkan keindahan wisata, seni dan budaya, tetapi juga harus mengedepankan keunggulan lainnya[14] yaitu diterapkannya protokol kesehatan dan pengawasan di sejumlah obyek wisata.

Konsekuensinya pihak pengelola obyek wisata harus menjamin keselamatan pengunjung agar tetap sehat, baik saat masuk maupun keluar dari obyek wisata. Pertimbangan ini menjadikan mekanisme standard yang disebut Standard Operasional Prosedur (SOP) di setiap destinasi wisata, sesuai protokoler seperti pembersihan tempat, wahana, dan peralatan dengan disinfektan, mengatur jalur kedatangan dan kepulangan pengunjung dan membatasi jumlah pengunjung. Penerapan Standard Operasional Prosedur menjadi daya tarik bagi wisatawan dan jaminan bagi pengunjung akan merasa aman dan nyaman pada saat berkunjung di destinasi wisata. Indonesia mempunyai obyek wisata berjumlah 962 tersebar di 34 provinsi berupa wisata ritual, wisata alam, wisata pantai, wisata taman karst, wisata sejarah, wisata suaka marga satwa dan lainnya. Dukungan pendapatan di sektor destinasi wisata dalam keadaan normal terhadap APBN sebesar 50%. Hal ini menjadi skala prioritas dalam memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional.

[13] Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community based Tourism*) Pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) dikembangkan berdasarkan prinsip keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan berbagai steakholders pembangunan. pariwisata termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat. Secara ideal priinsip pembangunan pariwisata " dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat ".Dalam setiap tahapan pembangunan, yang dimulai dari perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pengembangan sampai dengan pemantauan (monitoring) dan evaluasi, masyarakat setempat harus dilibatkan secara aktif dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi karena tujuan akhir adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Lihat "Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach. Edward Inskeep. Van Nostrand Reinhold, 115 Fifth Avenue, New York, NY 10003. 1991. 508p," *Journal of Travel Research*, 1993, https://doi.org/10.1177/004728759303100459;
Simin Tavallaee et al., "Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach," *Management Science Letters*, 2014, https://doi.org/10.5267/j.msl.2014.11.008.

[14] Pencitraan (*Branding*) *Brand* merupakan identitas yang dimiliki suatu destinasi wisata dan juga merupakan cerminan citra destinasi wisata (brand image). Setiap destinasi wisata mempunyai citra atau image tertentu yaitu mental maps seseorang terhadap satu destinasi wisata yang mengandung keyakinan, kesan dan persepsi. Lihat Philip Kotler, *Marketing Management*, (New York: Pearson Prentice Hall, 2009).

Vol. 3 No. 2 Desember 2020
DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001

Memperkokoh Perekonomian Pedesaan.

Desa yang kuat akan menguatkan negara Indonesia, inilah filosofi dalam praksis suatu langkah kebijakan. Paradigma program Desa semua untuk warga merupakan regulasi manajemen pemberdayaan masyarakat, terlebih ditengah penanganan pandemik COVID-19 yang sedang di hadapi bangsa Indonesia. Apapun jenis, tujuan, kebijakan yang dicita-citakan bangsa Indonesia merupakan penentu kesuksesannya. Kunci kesuksesan Indonesia hadir dalam kekuatan ada dalam kebersamaan aparat desa dengan warga masyarakat, untuk saling bahu membahu mensejahterakan desa dan bangsanya.

Wabah pandemik COVID-19 telah terbukti berpengaruh ujian terhadap daya tahan kehidupan desa. Fenomena ini mengkhawatirkan, *imaji public* itu berpotensi memupus harapan masa depan kemajuan desa. Realitasnya sungguh berbeda, vitalitas desa masih terjaga.Ketika penderita COVID-19 secara nasional mencapai 66.220 orang yang telah terpapar pandemi, desa hanya terjangkiti 909 orang. Urgensinya pandemi ini mengubah desa tidak lagi serupa tahun lalu kondisi normal sebelum pandemi, artinya bahwa desa telah memiliki jalan lain di masa depan, yaitu dengan beradaptasi atas keberadaan COVID-19.

Pemerintah telah memfokuskan keberadaan sumber daya guna menjaga resiliensi desa atas pandemi COVID-19. Terinspirasi berdasarkan Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan aturan prioritas penggunaan dana desa. Dalam aturan ini menegaskan tiga upaya utama menjaga kepentingan desa melawan pandemik COVID-19. ***Pertama*** merupakan arah kebijakan bersifat sosial, terutama menggerakkan 64.805 desa membentuk relawan dan kini telah ada 1.875.137 relawan untuk menanggulangi wadah COVID-19. Tiap relawan dipimpin kepala desa/lurah dengan mitra pendamping Babinkantibmas dan Babinsa desa atau kelurahan. ***Kedua,*** kebijakan dalam ranah kesehatan yang mengarah pada pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Diantaranya menjalankan sosialisasi hidup sehat, pengadaan masker gratis, penyediaan tempat cuci tangan di tempat tempat publik, penyemprotan disinfektan, dan pendirian pos gerbang desa tempat mendata pendatang di setiap jalan masuk desa. ***Ketiga,*** kebijakan yang mengarah ketahanan ekonomi desa, diantaranya menyalurkan BLT dana desa dan penyelenggaraan padat karya tunai desa (PKTD). Pemerintah dengan program BLT dana desa mencakup 7.7 juta keluarga miskin dan terdampak pandemi. Penyaluran BLT dana desa sudah di atas 72.500 desa (798%), Realisasi program padat karya diikuti 567.673 pekerja, termasuk di dalamnya 270.938 anggota rumah tangga miskin, serta 258.491 penganggur.[15]

Kolaborasi manifestasi program pemerintah melalui kementrian Desa dengan program edukasi model manajemen desa terbukti mengangkat desa sebagai penopang dalam mengatasi resesi krisis ekonomi nasional di era pandemik COVID-19 dan sebagai landasan bangkitnya gairah perkembangan pertumbuhan ekonomi memasuki adaptasi keadaan baru, tujuan stabilitas ekonomi dapat tergapai kembali secara normal dalam relatif tidak lama. Program Desa Semua untuk Warga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui orga-

[15]Luqman Hakim, "Mendes PDTT Menerima Gelar Doktor Honoris Causa Dari UNY - ANTARA News Yogyakarta - Berita Terkini Yogyakarta," accessed December 19, 2020, https://jogja.antaranews.com/berita/437054/mendes-pdtt-menerima-gelar-doktor-honoris-causa-dari-uny.

Vol. 3 No. 2 Desember 2020
DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001

nisasi desa guna memajukan dirinya demi kesejahteraan rakyat.

Dalam format kebijakan mencakup pokok pokok kebijakan di antaranya (1) Mengembangkan dan menempatkan masyarakat (warga) sebagai subyek pembangunan yang partisipatif; (2) Mentransformasi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan warga, menyajikan kenyamanan, dan ketentraman, sehingga masyarakat desa selalu merindukan warganya pulang kampong; (3) Mengeksplorasi potensi lokal untuk kepentingan warga; (4) Membangun jejaring dengan lingkungannya; dan (5) Membangun desa yang inklusif, ramah difabel, ramah anak, perempuan dan lansia.

Realisasi kelima kebijakan saat pandemik COVID-19telah diuji cobakan dalam format implementasi dalam dua jalur rumusan program yakni melalui (1) Program transformasi ekonomi desa dan (2) Program SDM Desa Unggul. Keberadaan sistem kelembagaan program transformasi ekonomi desa mencakup pembangunan desa dan perdesaan, pembangunan ekonomi dan pengembangan investasi desa, PDT, transmigrasi serta percepatan daerah tertinggal. Adapun program SDM Unggul mencakup pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal (PDT) dan transmigras serta inovasi dan informasi desa. Realitas implementasi kedua program uji coba telah menunjukkan hasil sangat menggembirakan. Tercatat 74.954 desa di Indonesia telah naik kelas baik sebagai status desa mandiri, maju dan berkembang. Adapun sisanya berstatus sangat tertinggal, ditargetkan menjadi nol di tahun 2024.

Masa depan yang relatif dekat membuahkan hasil harapan rebound ekonomi desa. Hal ini masuk akal, karena selama 4 bulan terakhir ekonomi desa masih bergerak. Tercatat sebanyak 10.629 Bumdes yang melakukan transaksi yang tersebar merata di 368 kabupaten/kota pada 33 provinsi. Walaupun jenis usaha Bumdes yang hidup itu memberikan keuntungan kecil, seperti unit link bank, simpan pinjam, perdagangan, jasa pembayaran listrik, PAM desa. Total transaksi mencapat Rp 308 miliar yang dijalankan 58.026 pekerja.

Melambungnya (*Rebound*) ekonomi Desa bakal disemarakan lebih dari 27.000 Bumdes lainnya yang bergerak di bidang pariwisata, produksi pertanian, kuliner dan produksi industri kecil. Diperkirakan, dalam waktu relatif dekat tahun ini, melambungnya (*rebound)* ekonomi desa bermula dari wisata desa[16], menampung warga yang sudah bosan berdiam di rumah. Sejumlah 7.275 desa wisata di Indonesia dapat menggunakan skema padat karya guna merawat seluruh asset wisata,[17] agar tidak rusak selama

[16] Potensi desa Menurut survei lapangan, dapat diklarifikasi bahwa setiap desa memiliki daya tarik sendiri.Turis datang ke desa untuk menikmati daya tarik desa seperti suasana pedesaan tradisional dan lanskap, budaya penduduk desa, dan sebagainya.Oleh karena itu, daya tarik desa penting untuk kegiatan wisata pedesaan.Kegiatan wisata pedesaan harus menunjukkan potensi desa sekaligus menyediakan kegiatan menarik untuk menarik wisatawan. Potensi desa dapat dipelihara dan dipelihara melalui kegiatan sehari-hari penduduk desa seperti bertani, menjaga kebersihan lingkungan mereka, menumbuhkan dan menjaga lingkungan, mempraktikkan adat istiadat, dll.Potensi desa ini merupakan bagian dari elemen lanskap budaya.Menjaga sumber daya dan potensi desa merupakan hal penting dalam konservasi lanskap budaya. Lihat Mechtild Rössler Bernd von Droste, Harald Plachter , "Cultural Landscapes of Universal Value : Components of a Global Strategy / Edited by Bernd von Droste , Harald Plachter , Mechtild Rössler ; with Contributions of 42 Scientists. - Trove," Jena, Germany : Gustav Fischer, 1995, https://trove.nla.gov.au/work/21920375.

[17]Baru-baru ini, jenis wisata lain telah berkembang di Borobudur. Saat ini wisatawan tidak hanya mengunjungi kuil, tetapi juga dapat mengunjungi desa-desa sekitarnya untuk menikmati suasana pedesaan dan atraksi lokalnya mis.melihat

Vol. 3 No. 2 Desember 2020
DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001

kevakuman dikala pandemik COVID-19. Desa wisata harus menerapkan adaptasi kebiasaan baru, sesuai protokoler.

Merestrukturisasi UMKM dengan jaminan berlapis.

Dalam penanganan akibat dampak pandemi COVID-19 berupaya membangkitkan kembali usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Strategi kebijakan pemerintah dengan pemberian jaminan berlapis melalui Askrindo dan Jamkrindo. Harapannya pihak perbankan lebih aktif dalam menyalurkan kredit kepada UMKM. Adapun landasan sebagai payung hukum pemberian jaminan berlapis terinspirasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.

Implementasi pemberian edukasi untuk memulai kebiasaan baru, menegakkan protokol kesehatan dan pemberian jaminan berlapis pemerintah telah menganggarkan 30 trilliun di bank yang ditunjuk, sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan UMKM dalam rangka membangkitkan kembali dari dampak COVID-19. Pada intinya kebijakan jaminan berlapis adalah kredit yang disalurkan sebagai tambahan modal kerja baik berupa kredit baru maupun kredit tambahan dari restrukturisasi akan mendapat jaminan hingga 80 % dari Askrindo dan Jamkrindo sebagai lembaga penjaminannya.

Heru Kristiana kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK[18] menyatakan bahwa data eksisting tanggal 22 Juni 2020 total kredit perbankan yang sudah direstrukturisasi sejumlah Rp 685,45 trilliun. Nilai restrukturisasi terdiri dari Rp 307,8 trilliun untuk sektor UMKM dan Rp 387,52 trilliun untuk non UMKM. Lebih lanjut Rosan Perkasa Roeslani[19] selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengatakan hingga bulan Juli 2020 total restrukturisasi kredit yang diajukan UMKM sudah lebih dari Rp 500 trilliun sekitar 50% dari Rp 1.100 trilliun total pinjaman yang disalurkan kepada pengusaha UMKM.

Optimalisasi Peran dan Tanggung Jawab BUMN dalam Pembangunan Nasional.

Dampak ekonomi COVID-19 adalah Resesi Ekonomi Global, Kebangkrutan Korporasi, Ledakan Penduduk Miskin dan Badai Pengangguran dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini dialami di Indonesia maupun di semua negara negara di dunia. Jika mencermati landasan konstitusional pembangunan nasional Indonesia

pertunjukan seni tradisional, lihat mencoba membuat tembikar, melihat industri rumah tahu, melihat pemandangan pedesaan yang indah, dan sebagainya. Lihat Titin Fatimah et al., "Pemetaan Budaya Di Kawasan Pedesaan: Studi Kasus Desa Giritengah, Borobudur," *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan* 2, no. 2 (March 30, 2019): 562, https://doi.org/10.24912/jmstkik.v2i2.3008.

[18] tingkat permodalan dan likuiditas perbankan nasional masih dalam kondisi aman. Rasio kecukupan permodalan perbankan sebesar 22,16% masih di atas ketentuan per Mei 2020. Otoritas Jasa Keuangan Jakarta lihat Novita Intan, "OJK: Tingkat Permodalan Bank Masih Aman | Republika Online," accessed December 19, 2020, https://republika.co.id/berita/qcsecx383/ojk-tingkat-permodalan-bank-masih-aman.

[19]tekanan terhadap UMKM sangat besar.Terbukti, banyak pengusaha yang akhirnya mengajukan restrukturisasi kredit lantaran bisnisnya terdampak Covid 19. Lihat Syahrizal Sidik, "Pemberian Stimulus Lambat, Pengusaha: Costly & Recovery Lama," accessed December 19, 2020, https://www.cnbcindonesia.com/market/20200707173234-17-170930/pemberian-stimulus-lambat-pengusaha-costly-recovery-lama.

Vol. 3 No. 2 Desember 2020
DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001

adalah diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 pada:

> Ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
> Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
> Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan
> Ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Jumlah BUMN di Indonesia sejumlah 143 BUMN dengan total aset Rp 8.092 triliun. BUMN di Indonesiaterdapat 2 (dua) bentuk BUMN yaitu badan usaha perseroan (Persero) dan perusahaan umum (Perum). BUMN merupakan kekayaaan negara yang dipisahkan tatakelola keuangannya berbeda dengan APBN.

Dalam mengantisipasi dampak Covid-19, Pemerintah memberikan suntikan dana kepada BUMN yang dianggap memiliki pengaruh besar hajat hidup masyarakat. Di harapkan perannya dari sisi exposure besar sistem keuangan dan dimiliki pemerintah dengan total aset yang cukup besar.17 perusahaan BUMN mendapatkan dana ban tuan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai total Rp 143,63 triliun. Dana diberikan dalam bentuk:

1. Pencairan utang pemerintah senilai Rp 108,48 triliun, kepada: PT Pertamina (Persero) Rp 40 triliun, PT PLN (Persero) Rp 48,46 triliun, PT Pupuk Indonesia (Persero) Rp 6 triliun dan PT KAI (Persero) Rp 300 miliar. Selanjutnya ada Perum Bulog sebesar Rp 560 miliar, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) Rp 1 triliun. Sejumlah perusahaan BUMN Karya seperti PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR).
2. Penyertaan modal negara Sebesar Rp 15,5 triliun; kepada PT Hutama Karya (Persero) Rp 7,5 triliun, PT PNM (Persero) Rp 1,5 triliun, PT BPUI (Persero) Rp 6 triliun dan ITDC sebesar Rp 500 miliar.
3. Dana talangan sebesar Rp 19,65 triliun; kepada PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) Rp 8,5 triliun, PT KAI Rp 3,5 triliun, Perum Perumnas Rp 650 miliar, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dan PT Perkebunan Nusantara (Persero) Rp 4 triliun.

Ada beberapa peran BUMN pada masa adaptasi kebiasaan baru

1. BUMN sebagai korporasi sendiri juga menjadi korban pandemik COVID-19karena itu konsoldiasi efisiensi, dan menjalankan proses bisnis yang *good corporate governance* melalui proses bisnis yang benar, bukan berdasarkan proyek.
2. BUMN harus fokus dalam menyelamatkan ekonomi karena posisinya yang berperan dalam menyumbang APBN, apalagi kontribusi pajak pasti akan terkoreksi dalam karena entitas usaha yang lain runtuh.

Vol. 3 No. 2 Desember 2020
DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001

3. Pemetaan BUMN berdasarkan portofolio bisnis dengan paramater nilai ekonomi layanan publik. Pemetaan akan menentukan langkah dan strategi Pemerintah untuk memutuskan, mempertahankan, mentransformasi, mengonsolidasi, atau pun divestasi atau pelepasan perusahaan.
4. Menjalankan penugasan Pemerintah untuk membangun stabilitas ekonomi nasional yang berkeadilan.
5. Menjalankan penugasan dengan penekanan efisiensi operasional

Penguatan peran politik hukum yang digunakan di Indonesia

Terakhir, strtaegi kebijakan yang dapat ditempuh dari perspektif hukum ekonomi adalah memfungsikan hukum menjadi Panglima agar dapat melandasi dalam penataan pertumbuhan ekonomi Nasional.

1. Politik hukum ideal:
   Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat terdiri: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
2. Politik hukum dasar
   Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".*right to life dan right to health.* Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". *right to life, right to health, right to fulfill the economic needs* Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."
3. Politik hukum yang dianut: Keadilan Proporsional
   Dalam memenuhi *right to life*, dan *right to health* secara seimbang dengan tujuan menciptakan *right to fulfill the economic needs*. Politik Hukum Instrumental menyesuaikan atau selaras dengan Politik Hukum Dasar, dalam arti konsisten, koheren, dan berkorespondensi dengan Politik Hukum Dasar.

Regulasi payung hukum dalam menyeimbangkan bidang aspek ekonomi dan hukum dalam menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru dengan menerapkan aturan yang diberlakukan diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yakni upaya mencegah dan menangkal keluar masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
2. Kepres Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan

Vol. 3 No. 2 Desember 2020
DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001

Masyarakat Corona Virus Disease 19 (COVID-19)

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.
4. UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Arah kebijakan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan keuangan negara kebijakan pendapatan dan belanja Negara. Kebijakan stabilitas sistem keuangan adalah kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Merupakan hubunganya dengan Kebijakan OJK dan Pemerintah. Dalam implementasinya diterbitkannya landasan aturan berupa: Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/328/ 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi dan Menteri BUMN Erick Thohir menerbitkan Surat Edaran Nomor S-336/MBU/05/2020 tentang Antisipasi Skenario The New Normal BUMN.

Selain landasan yuridis tersebut di atas, terakhir pemerintah mengambil langkah strategis dalam merampingkan kelembagaan pemerintah dalam mendukung kebijakan penanganan pandemi COVID-19. Sejumlah 20 lembaga dan badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) dan Keputusan Presiden (Keppres). lembaga non struktural yang dibentuk berdasakan kedua peraturan tersebut, lembaga yang dibentuk berdasarkan Perpres dan Keppres meliputi: Komite Kebijakan Industri Pertahanan; Dewan Ketahanan Pangan; Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; KP3EI KP3EI; Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur KPPIP; Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian TKMPP; Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan; Kantor Staf Presiden; Komite Ekonomi dan Industri Nasional; Komite Nasional Keuangan Syariah KNKS; Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Adapun lembaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Adalah sebagai berikut: Badan Promosi Pariwisata Indonesia; Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional; Dewan Ketahanan Nasional; Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi.

Menilik rekam jejak kebijakan Presiden Jokowi, perampingan lembaga negara bukan hal yang baru, Hal ini pernah dilakukan pada awal menjabat di periode pertama sebagai presiden juga melakukan di bidang reformasi birokrasi, Jokowi meneken Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 untuk merampingkan sejumlah 10 lembaga pada 5 Desember 2014, fenomena ini dilakukan dengan pertimbangan efisiensi dan

Vol. 3 No. 2 Desember 2020
DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001

optimalisasi kinerja lembaga negara yang dinilainya tak berguna dan mengurangi beban anggaran negara.

Di tengah tengah penanganan pandemi Covid 19 pemerintah telah bangkit dan bergegas kembali menjalankan pemba ngunan infrastruktur yang sudah terencana dengan baik sesuai platfon anggaran di berbagai bidang proyek proyek, dengan semangat dan keyakinan setidaknya meminimalisir tekanan pertumbuhan minus ekonomi nasional.Harapannya dapat mendorong tumbuh kembangnya geliat ekonomi rakyat.

PENUTUP

Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 tetap optimistis walaupun diprediksi mengalami resesi ekonomi nasional yang berpengaruh terjadi resesi bila ekonominya mengalami kontraksi pertumbuhan 0% (terkoreksi -5,1% ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020), namun langsung *rebound* tahun depan dengan pertumbuhan ekonomi 4,8%. Prediksi Pemerintah menjadi landasan antisipasi melakukan kebijakan penanggulangan baik penanganan pandemi dan membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi nasionalnya dengan pendekatan peluang dan ancaman, dengan strategi kebijakan diantaranya: Upaya pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional, mengambil kesempatan kerjasama perdagangan dengan pemerintah Tiongkok, membangkitkan bidang pariwisata, memperkokoh perekonomian perdesaan, restrukturisasi UMKM dengan jaminan berlapis, peran tanggung jawab BUMN dalam pembangunan nasional, peran politik hukum yang digunakan di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Andrea Lidwina. "Proyeksi Suram Ekonomi Indonesia - Infografik Katadata.Co.Id." Accessed December 19, 2020. https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5ef3fb527c9e2/proyeksi-suram-ekonomi-indonesia.

Bernd von Droste, Harald Plachter, Mechtild Rö ssler. "Cultural Landscapes of Universal Value : Components of a Global Strategy / Edited by Bernd von Droste , Harald Plachter, Mechtild Rössler ; with Contributions of 42 Scientists. - Trove." Jena, Germany : Gustav Fischer, 1995. https://trove.nla.gov.au/work/21920375.

Burger, Thomas, Talcott Parsons, and Jackson Toby. "Social Systems and the Evolution of Action Theory.The Evolution of Societies." *Social Forces*, 1978. https://doi.org/10.2307/2577644.

Cantika Adinda. "DPR Rapat Dengan Sri Mulyani, BI, OJK Bahas Nasib RI 2021." Accessed December 19, 2020. https://www.cnbcindonesia.com/news/20200622102431-4-167018/dpr-rapat-dengan-sri-mulyani-bi-ojk-bahas-nasib-ri-2021.

Dimas Jarot Bayu. "Jokowi Buat Perppu Penyelamatan Ekonomi Dari Corona, Anggaran Rp 405 T - Nasional Katadata.Co.Id." Accessed December 19, 2020. https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5e9a41f7ae83b/jokowi-buat-perppu-penyelamatan-ekonomi-dari-corona-anggaran-rp-405-t.

Fatimah, Titin, Nafi'ah Solikhah, Theresia

Budi Jayanti, and Klara Puspa Indrawati. "Pemetaan Budaya Di Kawasan Pedesaan: Studi Kasus Desa Giritengah, Borobudur." *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan* 2, no. 2 (March 30, 2019): 562. https://doi.org/10.24912/jmstkik.v2i2.3008.

Hady, Dr. Hamdy. "Manajemen Keuangan Internasional." Accessed December 19, 2020. http://repository.pelitabangsa.ac.id/xmlui/handle/123456789/1717.

Hakim, Luqman. "Mendes PDTT Menerima Gelar Doktor Honoris Causa Dari UNY - ANTARA News Yogyakarta - Berita Terkini Yogyakarta." Accessed December 19, 2020. https://jogja.antaranews.com/berita/437054/mendes-pdtt-menerima-gelar-doktor-honoris-causa-dari-uny.

Hendra Kusuma. "Sri Mulyani-DPR Rapat Virtual Bahas Dampak Corona Ke Ekonomi RI." Accessed December 19, 2020. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4966883/sri-mulyani-dpr-rapat-virtual-bahas-dampak-corona-ke-ekonomi-ri.

"HSBC: Yuan Bakal Dominasi Perekonomian Dunia." Accessed December 19, 2020. https://finance.detik.com/moneter/d-2639315/hsbc-yuan-bakal-dominasi-perekonomian-dunia.

Indrianto Eko Suwarso. "Bukan 2 Juta, Kadin Sebut Korban PHK Akibat Corona 15 Juta." Accessed December 19, 2020. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200501181726-92-499298/bukan-2-juta-kadin-sebut-korban-phk-akibat-corona-15-juta.

Intan, Novita. "OJK: Tingkat Permodalan Bank Masih Aman | Republika Online." Accessed December 19, 2020. https://republika.co.id/berita/qcsecx383/ojk-tingkat-permodalan-bank-masih-aman.

Kotler, Philip. "Marketing Management , Millenium Edition." *Marketing Management*, 2000. https://doi.org/10.1016/0024-6301(90)90145-T.

Lillian Yang. "China Starts Major Trial of State-Run Digital Currency | China | The Guardian." Accessed December 19, 2020. https://www.theguardian.com/world/2020/apr/28/china-starts-major-trial-of-state-run-digital-currency.

Madura, Jeff. *International Financial Management. 11th Edition*. Vol. 4. New York, NY: Prentice Hall. International, Inc, 2016.

ryz. "Lebih Berat Dari Krisis 1998, Ini Tanda-Tanda Ekonomi Indonesia Alami Resesi : Okezone Economy." Accessed December 19, 2020. https://economy.okezone.com/read/2020/06/24/20/2235630/lebih-berat-dari-krisis-1998-ini-tanda-tanda-ekonomi-indonesia-alami-resesi.

Sidik, Syahrizal. "Pemberian Stimulus Lambat, Pengusaha: Costly & Recovery Lama." Accessed December 19, 2020. https://www.cnbcindonesia.com/market/20200707173234-17-170930/pemberian-stimulus-lambat-pengusaha-costly-recovery-lama.

Smith, Adam. *The Theory of Moral Sentiments*. London: Pinguin, 2008.

Vol. 3 No. 2 Desember 2020
DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001

http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf.

Tavallaee, Simin, Ali Asadi, Hamid Abya, and Mohsen Ebrahimi. "Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach." *Management Science Letters*, 2014. https://doi.org/10.5267/j.msl.2014.11.008.

"Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach. Edward Inskeep. Van Nostrand Reinhold, 115 Fifth Avenue, New York, NY 10003. 1991. 508p." *Journal of Travel Research*, 1993. https://doi.org/10.1177/00472875933100459.